

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
INKLUSIF TERHADAP KANAK-KANAK DENGAN
KEPERLUAN KHUSUS DI DINAS PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

*(ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION
POLICY FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AT THE OFFICE OF
EDUCATION CENTRAL SULAWESI PROVINCE)*

Faizal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi yang dikembangkan pada sekolah inklusif di Sulawesi Tengah, kompetensi pendidik dalam penanganan kanak-kanak dengan keperluan khusus, ketersediaan sarana dan prasarana pada sekolah inklusif, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 184 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan total berjumlah 36 orang. Data-data primer diperoleh dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), daftar pertanyaan (kuesioner), dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berlangsung dengan baik. Bahwa dalam perkhidmatan kepada kanak-kanak dengan keperluan khusus dalam kategori cukup baik atau cukup memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam perkhidmatan kepada kanak-kanak dengan keperluan khusus pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah : Komunikasi yang efektif, sumberdaya yang belum memadai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif, Sulawesi Tengah, kanak-kanak

Abstract

This research is aimed at recognizing the communicative patterns developed at inclusive school at Central Sulawesi, educators competency in handling children with special needs, the availability of facilities at the inclusive school, factors affecting on the educational inclusive services. This study implements the descriptive qualitative method. The population of this research includes 184 people. The sampling drawing is conducted through purposive sampling technique with the total number of 36 people. The primary data is obtained through observation, interview, questionnaire, and documentation. The obtained data is analyzed through the use of qualitative method. The result of this research shows that implementation of the policy for inclusive education for service provision of the Office of Education. Central Sulawesi province has been well implemented. The evaluation on the

serive for children with special needs is evaluated as in sufficiently good category. Factors affecting the implementation of such a program conducted by the office of education. Central Sulawesi involves effective communication, insufficient resources.

Key Words: *The Implementation Of Inclusive Education, Central Sulawesi, children*

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya, proses implementasi kebijakan menuntut adanya orang atau pelaksana, dukungan dana dan kemampuan organisasi atau sumber daya yang sangat mendukung untuk dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Sesuai dengan pendapat Edwards III, 1980:148 bahwa proses komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarkan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi. Untuk menjamin keberhasilan dan efektifnya implementasi kebijakan pendidikan inklusi itu diperlukan sumber daya yang cukup, sikap pelaksana untuk menerapkan kebijakan tersebut. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya cukup memahami dan mengetahui apa yang mereka kerjakan dan memiliki sumber daya yang tinggi saja, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan itu. Untuk struktur birokrasi merupakan prosedur kerja bagi pelaksana kebijakan tersebut. Sejalan dengan itu Grindle (1980:10) mengemukakan variabel sebagai berikut: (1) Isu kebijakan (*content of policy*) yang terdiri atas: a. Kepentingan siapa yang terlibat, b. Macam-macam manfaat, c. Sejauh mana perubahan akan diwujudkan, d. Tempat pembuatan kebijakan, e. Siapa implementatornya, f. Sumber daya yang tersedia. (2) Konten Implementasi (*Content of Implementation*) yang terdiri atas: a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, b. Karakteristik lembaga dan rezim, c. Sesuai kaidah dan tingkat responsif.

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain; (1) Kebijakan, hukum dan perundang-undangan, (2) Sikap, pengalaman dan pengetahuan, (3) Tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, (4) Perubahan paradigma pendidikan (manajemen berbasis sekolah, otonomi daerah, desain pembelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian hasil belajar), (5) Adaptasi lingkungan, penciptaan kerja, dan pemilik perusahaan, (6) Kerjasama Kemitraan (pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat). Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan dan saling ketergantungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Implementasi pendidikan inklusif sangat tergantung pada sikap, pengetahuan, fleksibilitas dan kemampuan kreatif untuk memecahkan masalah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan, hingga pada individu, guru, orang tua dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20/tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Pada pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian pasal 41 Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan keperluan khusus.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Pasal 3 (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya Permendiknas No. 33 tahun 2008 Bab. II butir 1.d. dijelaskan bahwa Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik dengan keperluan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

Selama ini pelayanan bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus disediakan dalam tiga lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) dan Pendidikan inklusif. Di Sulawesi Tengah lokasi Sekolah Luar Biasa sebagian besar berada di wilayah kota provinsi, kabupaten/kota sedangkan keberadaan kanak-kanak dengan keperluan khusus tersebar di wilayah kecamatan, kelurahan/desa. Akibatnya sebagian kanak-kanak dengan keperluan khusus tidak dapat bersekolah karena SLB yang jauh dari rumahnya. Sekolah reguler terdekat ada yang tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Bagi yang diterima mereka berpotensi gagal yang pada akhirnya putus sekolah karena ketiadaan pelayanan yang tepat.

Pendidikan inklusif penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, lebih spesifik tujuan pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus, tentu dengan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sarana dan prasarana, penyesuaian kurikulum, dukungan dana serta sosialisasi. Jika hal ini tidak dilakukan akan menjadi hambatan dalam pengembangan pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus.

Sistem pelayanan pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus menunjukkan belum maksimal hal inilah sehingga penulis memfokuskan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Dalam Pelayanan Kanak-kanak Dengan Keperluan Khusus pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- 1) Bagaimana pola komunikasi yang dikembangkan pada sekolah inklusif
- 2) Bagaimana peningkatan kompetensi pendidik dalam penanganan kanak-kanak dengan keperluan khusus pada Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah
- 3) Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan kanak-kanak dengan keperluan khusus
- 4) Faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pelayanan pendidikan kanak-kanak dengan keperluan khusus Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing data, yakni pengecekan data-data yang diperoleh berkaitan dengan kelengkapan, keterikatan dengan waktu dan masalah yang ada.
2. Pengelompokan data, yaitu menggolongkan dan mengelompokkan data guna memudahkan penafsiran.
3. Menafsirkan makna data, yaitu mencari arti atau makna yang lebih luas dari data yang ada dan diolah dengan menghubungkan pada ilmu pengetahuan serta hasil penemuan yang ada.
4. Menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai jawaban dari masalah yang diajukan.

Analisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian untuk mengukur nilai dari variabel yang diteliti digunakan skala *Likert*. Menurut Sugiono (2005:134) skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert* maka variabel penelitian yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk dijadikan item-item instrument dalam bentuk kuesioner yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan.

Dari hasil lembar kuesioner tersebut diinterpretasikan melalui interval berdasarkan jumlah responden yang dipilih sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. 81% - 100% sangat baik/sangat memadai/sangat sesuai/sangat berupaya
- b. 61% - 80% baik/memadai/sesuai/berupaya
- c. 41% - 60% cukup baik/cukup memadai/cukupsesuai/cukupberupaya
- d. 21% - 40% kurang baik/kurang memadai/kurang sesuai/kurang berupaya
- e. 1% - 20% Tidak baik/tidak memadai/tidak sesuai/tidak berupaya

Selanjutnya jawaban setiap item instrumen menggunakan skala *Likert* dengan gradasi sangat positif sampai negatif dan setiap itemnya diberi bobot dengan interval sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. Sangat baik/sangat memadai/sangat sesuai/sangat berupa | = 5 |
| b. Baik/ memadai/ sesuai/ berupaya | = 4 |
| c. Cukup baik/cukup memadai/cukup sesuai/cukup berupaya | = 3 |
| d. Kurang baik/kurang memadai/ kurang sesuai/kurang berupaya | = 2 |
| e. Tidak baik/tidak memadai/tidak sesuai/tidak berupaya | = 1 |

Dalam menentukan nilai dari setiap kategori jawaban akan ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh. Adapun nilai tertinggi adalah $36 \times 5 = 180$ dan nilai terendah adalah $36 \times 1 = 36$. Untuk lebih mempertegas kategori setiap indikator, maka ditetapkan nilai interval sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| a. Sangat baik/sangat memadai/sangat sesuai/sangat berupaya | 145 - 180 |
| b. Baik/ memadai/ sesuai/ berupaya | 109 - 144 |
| c. Cukup baik/cukup memadai/cukup sesuai/cukup berupaya | 73 - 108 |
| d. Kurang baik/kurang memadai/ kurang sesuai/kurang berupaya | 37 - 72 |
| e. Tidak baik/tidak memadai/tidak sesuai/tidak berupaya | 1 - 36 |

Kemudian untuk menentukan persentase skor yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penentuan kategori setiap indikator menggunakan interpretasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Skor Yang diperoleh}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian yang diperoleh dari sebaran kuesioner kepada semua responden yang berjumlah 36 orang pada sekolah penyelenggara inklusif, merupakan data primer karena semua diperoleh di lapangan dengan menggunakan media penelitiannya yaitu daftar pertanyaan. (jawaban setiap responden yang memilih setiap pertanyaan dalam kuesioner) untuk menjelaskan kecenderungan dari kategori jawaban responden.

Variabel yang diteliti adalah implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu pola komunikasi yang dikembangkan, peningkatan kompetensi pendidik, berdasarkan konsep Edward

III (1984:10) mengajukan empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan komunikasi, sumber daya, dispoosisi dan struktur birokrasi.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan merupakan suatu pola pelayanan fungsional yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus yang dimaksud yakni berdasarkan konsep dikemukakan Budiono (1999:28), pelayanan adalah “suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan” serta penjelasan Permendiknas No. 33 tahun 2008 pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. .

Pemenuhan layanan pendidikan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan pendidikan inklusif dalam pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus dijelaskan dengan penyiapan sarana dan prasarana kanak-kanak dengan keperluan khusus.

Rekapitulasi Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kumulatif pola komunikasi yang dikembangkan pada sekolah inklusif menunjukkan baik artinya dapat dipahami bahwa pola komunikasi yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif sudah terlaksana dengan baik. Namun peningkatan kompetensi pendidik, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kumulatif peningkatan kompetensi pendidik belum memadai artinya dapat dipahami bahwa peningkatan kompetensi pendidik dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif belum terlaksana dengan maksimal. Secara lengkap dikemukakan sebagai berikut:

Jadual 1. Rekapitulasi hasil penelitian variabel implementasi kebijakan terdiri atas pola komunikasi yang dikembangkan dan peningkatan kompetensi pendidik.

No	Sub Variabel	Indikator	Jumlah Skor Yang Diperoleh	Persentase (%)
1.	Pola Komunikasi Yang Dikembangkan	1. Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Inklusif	122	67.78%
		2. Melibatkan Unsur-Unsur Terkait	128	71.11%
		3. Sesuai dengan Aturan dan Ketentuan	133	83.13%
2.	Peningkatan Kompetensi pendidik	1. Menyediakan Tenagapendidik	78	46.11%
		2. Melaksanakan Diklat/Workshop.	93	51.66%
Rata-rata			110.8	63.96%

Selanjutnya untuk mengetahui jumlah rata-rata skor dan persentase secara keseluruhan dari variabel implementasi kebijakan pendidikan inklusif, maka untuk mendapatkan jumlah rata-rata skornya adalah menjumlah skor yang diperoleh dari sub variabel kemudian dibagi lima. Hasilnya adalah 110.8 atau 63.96%. Mengacu pada analisis deskriptif kualitatif yang kemudian untuk mengukur nilai dari variabel yang teliti digunakan skala *likert* dengan nilai interval tertentu, maka dari hasil data reka pitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah dilaksanakan dengan baik.

Rekapitulasi variabel pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus pada sekolah inklusif, terdiri atas penyediaan sarana dan prasarana bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus pada sekolah inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kumulatif penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah inklusif cukup memadai artinya dapat dipahami bahwa penyediaan sarana

dan prasarana pada sekolah inklusif dalam pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus belum terlaksana dengan maksimal. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Jadual 2. Rekapitulasi Persentase Indikator yang Diperoleh dari Sub Variabel Y

No	Sub Variabel	Indikator	Jumlah Skor Yang Diperoleh	Persentase (%)
1.	Menyiapkan Sarana dan Prasarana ABK	1. Menyediakan Aksesibilitas	117	65.00%
		2. Menyediakan Alat Bantu / Media Pembelajaran	102	56.67%
		3. Menyediakan Ruang Kelas	90	50.00%
Rata-Rata			103	57.22%

Hasil penelitian menunjukkan bahawa perolehan rata-rata skor pada sub variabel menyiapkan sarana dan prasarana bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus adalah 103 atau 57.22%. Mengacu pada analisis deskriptif kualitatif yang kemudian untuk mengukur nilai dari variabel yang diteliti digunakan skala *likert*, maka dapat disimpulkan bahawa pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terlaksana dengan cukup baik.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pelayanan kanak-kanak dengan keperluan khusus adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah unsur penting dalam implementasi kebijakan, melalui komunikasi yang baik menciptakan hubungan yang baik dalam menunjang tujuan yang diharapkan.

Secara kelembagaan Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah telah mengembangkan komunikasi yang efektif sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, H. Abu Bakar Almahdali, menyatakan bahawa:

“Saya mengembangkan ada semacam rapat koordinasi secara menyeluruh untuk provinsi Sulawesi Tengah, tentang pembinaan dan pengembangan sekolah bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus. Sebuah kebijakan bias berjalan dengan baik apabila ada komitmen dan motivasi dari apa rat dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Saya melihat apa rat kita telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.”

2. Faktor Penghambat

Sedangkan faktor penghambat dalam layanan bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus adalah sumber daya yang belum memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahawa peningkatan kompetensi pendidik belum memadai. Sekolah penyelenggara inklusif di Sulawesi Tengah tidak didukung tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan luar biasa / pendidikan khusus. Terbatasnya frekuensi pelaksanaan diklat/workshop. Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf, umur 46 tahun Kepala SLB Negeri Marawola, menyatakan bahawa:

“Sumber daya manusia masih terbatas, yang pertama harus diprioritaskan dalam upaya meningkatkan mutu kanak-kanak dengan keperluan khusus di masa akan datang adalah penyediaan SDM dengan latarbelakang PLB. Dinas pendidikan daerah telah melakukan program peningkatan mutu pendidikan, namun masih terbatas pada program dari pusat. Di masa depan Dinas Pendidikan Daerah diharapkan berkreatifitas sendiri dalam upaya peningkatan mutu PLB dengan membuat program sesuai dengan keperluan lokal”

Selain itu ditemukan pula bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah belum adanya peraturan ataupun petunjuk operasional dalam pelaksanaan pendidikan inklusif oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dengan indikator-indikator yang ditetapkan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola komunikasi yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan baik, melalui sosialisasi. Keberhasilan sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif pada sekolah inklusif karena dilaksanakan secara terpadu oleh pihak Direktorat PSLB, Dinas Pendidikan Daerah, LPMP dan oleh Sekolah Luar Biasa, Sekolah Inklusif serta aliansi kementerian terkait. Melibatkan unsur-unsur terkait menunjukkan bahwa "*stake holder*" telah terlibat dengan baik dan menaruh perhatian dan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dikembangkan mengakomodir keperluan dan kemampuan serta kepentingan kanak-kanak dengan keperluan khusus sebagaimana tujuan pendidikan inklusif..
2. Peningkatan kompetensi pendidik dalam penanganan kanak-kanak dengan keperluan khusus belum terlaksana dengan baik. Penyediaan tenaga pendidik dan pelaksanaan diklat/workshop bagi guru sekolah inklusif masih belum memadai. Sekolah inklusif belum memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus. Pelaksanaan diklat/workshop belum merata untuk semua guru.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk kanak-kanak dengan keperluan khusus pada sekolah inklusif cukup tersedia. Kanak-kanak dengan keperluan khusus dapat mengakses fasilitas yang ada di sekolah, alat bantu/media pembelajaran cukup tersedia melalui bantuan dari Direktorat PSLB maupun pengadaan sendiri. Pemenuhan ruang kelas belum memadai terutama ruang khusus bagi anak berkebutuhan misalnya ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang terapi dan ruang keterampilan.
4. Faktor yang mendukung adalah Komunikasi yang efektif. Kebijakan pendidikan inklusif telah disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan. Faktor yang menghambat adalah sumber daya manusia yang belum memadai. Sekolah inklusi tidak terdapat tenaga pendidik dengan kualifikasi PLB dan pelaksanaan diklat/workshop belum merata pada setiap guru serta belum adanya petunjuk operasional pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif.

CADANGAN

Kendala utama dalam pelayanan pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan khusus di sekolah inklusif adalah tidak tersedianya tenaga pendidik yang berkualifikasi pendidikan luar biasa. Dari kendala ini disarankan:

1. Pemerintah provinsi dan Kab./Kota diharapkan berkolaborasi untuk mengalokasikan kuota pengangkatan guru CPNS PLB untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik pada sekolah inklusif dan sekolah luarbiasa.
2. Perguruan tinggi yang ada diharapkan membuka program studi/jurusan pendidikan luarbiasa/pendidikan khusus. Atau dengan memasukan matakuliah Pendidikan LuarBiasa/Pendidikan. Khusus yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa FKIP, sebagai upaya memenuhi kelangkaan tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan Luar Biasa.
3. Bagi sekolah inklusi diharapkan untuk mengembangkan pola kemitraan dengan sekolah luarbiasa sebagai upaya mengembangkan wawasan guru sekolah inklusi serta mengantisipasi keterbatasan tenaga pendidik dengan kualifikasi PLB.
4. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah sebagai petunjuk atau kebijakan operasional kaitannya dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah serta menjadi acuan operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif.

RUJUKAN

- Boediono, B. 1999. *Pelayanan prima*, Kawula Indonesia, Jakarta
- Edwards III, George. C, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C.
- Grindle, Merilee, S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

Dokumen

- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No. 33 tahun 2008 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

Faizal
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako (UNTAD)
Sulawesi Tengah, Indonesia